

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

#### **1. Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dari pengertian tersebut maka pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting, yakni:

1. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terus menerus;
2. Usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan perkapita; dan
3. Kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

(Sadono Sukirno, 1985: 13).

#### **2. Pembangunan Daerah dan Unsur-unsurnya**

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dapat dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumberdaya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab.

Ada tiga unsur dasar dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah jika dikaitkan dengan hubungan pusat dan daerah, yaitu:

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, demikian juga yang baik bagi daerah belum tentu juga baik secara nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah biasanya berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat.

(Mudrajad Kuncoro, 2004: 47).

Dalam implementasi perencanaan daerah, ternyata banyak masalah yang muncul, masalah-masalah tersebut diantaranya adalah:

1. Propenas dan Propeda bukanlah rencana yang kontinyu sebab hanya dipersiapkan lima tahun sekali.
2. Masih tidak jelasnya bagaimana dan kapan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* terintegrasi.
3. Perencanaan di lapangan menunjukkan kesenjangan yang besar dalam memperhitungkan kemampuan finansial.
4. Perencanaan tersebut terlalu memfokuskan diri pada anggaran dan proyek pembangunan dari pada memandang anggaran secara keseluruhan.

(Mudrajad Kuncoro, 2004: 58).

### **3. Pembangunan Wilayah**

Pembangunan wilayah bertujuan untuk merubah wajah dan bentuk perekonomian wilayah-wilayah dalam lingkungan perekonomian nasional dengan berpedoman pada kebijaksanaan nasional dan mendasarkan pada sumberdaya-sumberdaya yang tersedia, dimana perencanaan

pembangunannya disusun secara terintegrasi meliputi berbagai jenis bidang pembangunan. (Rahardjo Adisasmita, 2005: 121).

Penyusunan rencana pembangunan wilayah yang komprehensif dilaksanakan melalui beberapa tahap. Tahap *pertama*, berdasarkan pada potensi sumberdaya yang tersedia baik secara fisik maupun secara finansial, maka disusunlah suatu kerangka rencana pembangunan ekonomi masing-masing wilayah. Tahap *kedua*, penyusunan kerangka rencana pembangunan fisik yang dibuat berdasarkan pada rencana pembangunan ekonomi. Tahap *ketiga*, penyusunan kerangka rencana pembangunan sosial-budaya. (Rahardjo Adisasmita, 2005: 122).

Penyusunan rencana pembangunan wilayah juga harus memenuhi beberapa prinsip utama dalam implementasi perencanaan pembangunan wilayah sebagai berikut:

1. Perencanaan harus disusun berdasarkan pada kemampuan efektif untuk melaksanakan pembangunan;
2. Kesadaran dan dukungan politik untuk suatu kebijaksanaan harus senantiasa dipupuk;
3. Penggunaan instrumen-instrumen atau sarana-sarana untuk pembangunan wilayah harus direncanakan secara terkoordinasi;
4. Suatu keseimbangan nasional dalam pembangunan antar wilayah harus tetap dipertahankan.

(Rahardjo Adisasmita, 2005: 141).

#### **4. Pertumbuhan Ekonomi**

Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi

kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. (M.L. Jhingan, 1999: 72).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang bila tingkat kegiatan ekonominya adalah lebih tinggi dari yang dicapai sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah merupakan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. (Sadono Sukirno, 1985: 19).

Perlu disadari bahwa perubahan nilai pendapatan yang berlaku dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor, yakni:

1. Perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi; dan
2. Perubahan dalam tingkat harga.

(Sadono Sukirno, 1985: 19).

## **B. Perencanaan dan Proses Perencanaan**

Perencanaan menurut Robinson Tarigan adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor di luar jangkauan pengendalian yang saling berkaitan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut. (Robinson Tarigan, 2004: 3).

Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, *pertama* ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang *kedua* ialah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Lincoln Arsyad (dalam Robinson Tarigan,

2004: 5).

Proses perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui tiga cara, yakni:

*Pertama*, mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik, setelah ciri-ciri suatu rencana diketahui lalu diusahakan supaya rencana yang dibuat memenuhi syarat. Adapun ciri-ciri itu adalah (Sondang P. Siagian, 1990: 111-112) sebagai berikut:

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi;
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan;
4. Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti;
5. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan;
6. Rencana harus bersifat sederhana, yakni bersifat sistematis dan mudah dipahami;
7. Rencana harus luwes, yakni terdapat kemungkinan untuk mengadakan perubahan tanpa merubah pola dasar keseluruhan rencana;
8. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan risiko;
9. Rencana harus bersifat praktis; dan
10. Rencana harus merupakan ramalan (*forecasting*) atas keadaan yang mungkin dihadapi.

*Kedua*, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab dengan memuaskan. Pertanyaan-pertanyaan itu meliputi (Sondang P. Siagian, 1990: 113-114):

1. Apa kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya;
2. Dimana kegiatan-kegiatan tersebut hendak dijalankan;

3. Kapan kegiatan-kegiatan tersebut hendak dilaksanakan;
4. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut ke arah tercapainya tujuan;
5. Siapa yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut; dan
6. Mengapa kegiatan tersebut dilaksanakan.

*Ketiga*, memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Langkah-langkah yang harus dilaksanakan yaitu (Sondang P. Siagian, 1990: 114-115):

1. Mengetahui sifat hakiki dari masalah yang dihadapi;
2. Kumpulkan data-data;  
Data-data yang dimaksud adalah: (a) fakta-fakta yang relevan, (b) informasi dari unit organisasi yang lebih rendah, (c) saran dari para anggota organisasi, (d) ide dari bawahan, (e) kritik dari dalam dan luar organisasi.
3. Penganalisaan data-data;
4. Penentuan beberapa alternatif;
5. Memilih cara yang terbaik;
6. Pelaksanaan; dan
7. Penilaian hasil yang dicapai.

## **C. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)**

### **1. Tujuan PEMP**

Tujuan PEMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

## **2. Sasaran PEMP**

Sasaran kelompok pemanfaat program PEMP ini adalah masyarakat pesisir, yang berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, pengolah ikan, pengusaha jasa perikanan, dan pengelola pariwisata bahari serta usaha atau kegiatan lainnya yang terkait dengan kelautan dan perikanan.

Sementara sasaran penetapan lokasi PEMP adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan.
- b. Memiliki masyarakat pesisir miskin relatif banyak.
- c. Adanya dukungan dan kepedulian dari pemerintah daerah yang bersangkutan pada pengembangan kelautan dan perikanan.

## **3. Organisasi dan Kelembagaan**

Dalam organisasi dan kelembagaan PEMP, ada lima pihak yang terkait di dalamnya, yakni:

### **a. Pemerintah.**

Terdiri atas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), DKP Provinsi, dan DKP Kabupaten / Kota.

### **b. Konsultan Menejemen (KM) Kabupaten/ Kota.**

Terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, atau perusahaan jasa konsultansi yang ditunjuk langsung oleh Bupati / Walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten / Kota.

Tugas KM adalah:

- (1) Membantu Dinas Kabupaten / Kota dalam proses konsolidasi kelembagaan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP M3) hingga menjadi badan hukum koperasi;
- (2) Bersama Tenaga Pendamping Desa (TPD) mendampingi dan memfasilitasi masyarakat pesisir untuk mengakses Dana Ekonomi Produktif (DEP);
- (3) Bersama TPD melakukan pendampingan teknis dan manajemen usaha.

**c. Tenaga Pendamping Desa (TPD).**

TPD adalah tenaga terdidik (minimal berpendidikan setingkat Diploma III), diutamakan yang telah memiliki pengalaman dalam program pemberdayaan masyarakat serta bersedia ditempatkan di wilayah pesisir seluruh Indonesia.

Pada masing-masing kabupaten / kota akan ditempatkan 2 (dua) orang TPD. Satu orang direkrut oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (P3K) dan satu orang lainnya direkrut oleh Dinas Kabupaten / Kota masing-masing.

TPD bertugas:

- (1) Bersama KM mendampingi dan memfasilitasi masyarakat pesisir untuk mengakses DEP;
- (2) Bersama KM melakukan pendampingan teknis dan manajemen usaha;
- (3) Membantu masyarakat pesisir untuk mengakses modal usaha yang bersumber dari perbankan.

**d. Koperasi Perikanan Mina Mandiri (KPMM) atau Koperasi Perikanan.**

Koperasi KPMM atau Koperasi Perikanan berperan sebagai penerima DEP sebagai modal koperasi yang pengelolaannya diserahkan kepada Swamitra Mina milik koperasi yang bersangkutan atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir yang sahamnya juga dimiliki oleh koperasi tersebut. Koperasi Perikanan Mina Mandiri/ Koperasi Perikanan harus membentuk



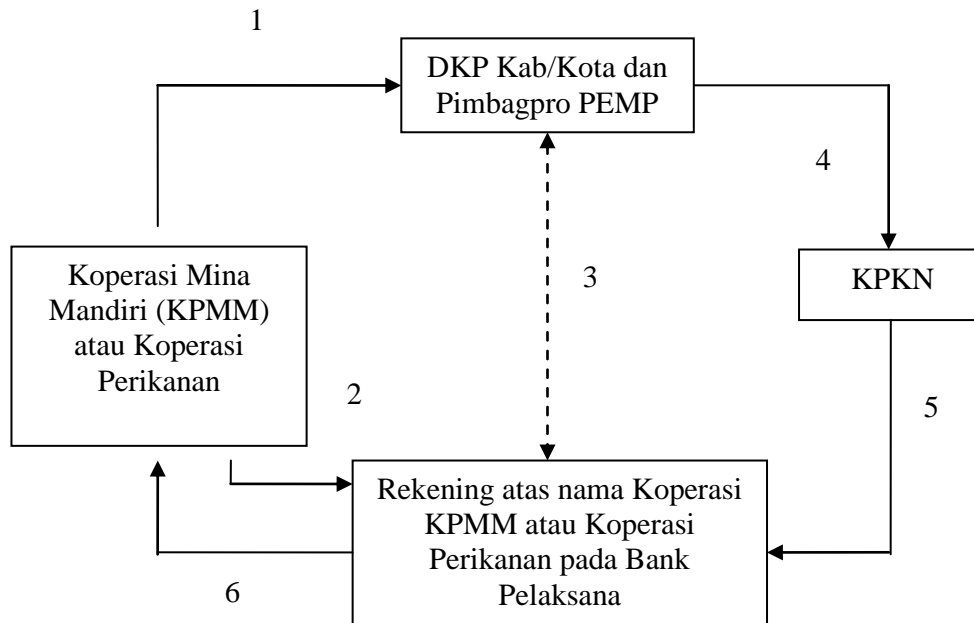
Swamitra Mina paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya DEP oleh koperasi tersebut. Selain itu koperasi ini diharapkan berperan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan unit usaha lain, seperti unit usaha perikanan tangkap / budidaya, toko sarana mina, SPD (*Solar Packed Dealer*), dan wisata bahari.

**e. Lembaga Perbankan Pelaksana.**

Lembaga ini merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang perbankan yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Bank Pelaksana untuk menyalurkan DEP kepada KPMM / Koperasi Perikanan dengan pola DEP yang dijaminakan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

**4. Proses Pencairan Dana Ekonomi Produktif (DEP)**

Dana bergulir bantuan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang disalurkan oleh pemerintah melalui Departemen Kelautan dan Perikanan kepada nelayan disebut Dana Ekonomi Produktif (DEP). DEP ini terlebih dahulu dibukukan dalam rekening giro atas nama KPMM /Koperasi Perikanan untuk kemudian dijadikan pinjaman. Jangka waktu pinjaman dari Bank Pelaksana kepada Koperasi Perikanan maksimal lima tahun. Proses pencairan DEP dari pemerintah kepada nelayan ditunjukkan oleh bagan di bawah ini:



Bagan 2. Proses Pencairan Dana Ekonomi Produktif (DEP).

Sumber: Kepmen No. 18 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PEMP, 2010.

Keterangan:

1. Koperasi Perikanan Mina Mandiri / Koperasi Perikanan mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Kabupaten / Kota, selanjutnya Dinas Kabupaten / Kota memberikan rekomendasi.
2. Koperasi Koperasi Perikanan Mina Mandiri / Koperasi Perikanan mengajukan permohonan pembukaan rekening kepada Bank Pelaksana serta dokumen yang diperlukan.
3. Bank Pelaksana bersama dengan Dinas Kabupaten / Kota mengevaluasi kelengkapan permohonan tertulis dari Koperasi Mina Mandiri / Koperasi Perikanan.
4. Proposal disetujui oleh Pimbagpro dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/ Kota kemudian diajukan ke KPN Daerah
5. KPN Daerah mencairkan DEP dan mentransfer ke rekening Koperasi Perikanan Mina Mandiri / Koperasi Perikanan pada Bank Pelaksana.

6. Bank Pelaksana melakukan pengikatan kredit selama jangka waktu 5 (lima) tahun untuk program penyaluran DEP.

#### **D. Pendapatan**

Secara umum pendapatan diartikan sebagai materi (uang) yang diterima oleh sebuah objek (manusia) sebagai balas jasa kepemilikan faktor produksi, keahlian, dan investasi.

Pendapatan pribadi adalah semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk suatu negara.

(Sadono Sukirno, 2000: 49). Sedangkan pendapatan disposebel adalah pendapatan pribadi yang dikurangi dengan pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan. (Sadono Sukirno, 2000: 51). Pendapatan disposebel ini sering disebut sebagai pendapat masyarakat yang siap untuk digunakan mengkonsumsi kebutuhan mereka berupa barang dan jasa.

Pendapatan yang diterima oleh seseorang berbeda dengan yang lain, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Keahlian;
2. Tingkat pendidikan;
3. Kemauan untuk menerima ketidakpastian;
4. Kepemilikan properti;
5. Ketidaksempurnaan pasar.